

## ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI ROKOK DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 1993-2010

Romadhansya Indra Setiyadi, Purbayu Budi Santosa<sup>1</sup>

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*Unemployment is a labor issue that currently has reached a critical condition. One attempt to reduce unemployment is to develop sectors that can create jobs. The industrial sector is one sector that has a noticeable role in employment. In Kudus Regency, one of the industries that have an important role in employment is the cigarette industry. This study aims to analyze the factors affecting employment in the cigarette industry in Kudus Regency in 1993-2010. This study uses time series data years 1993-2010 were analyzed using multiple regression methods. The results of the analysis showed that the variable number of firms has a positive and significant effect on employment industry. Variable wages has a positive and significant effect on employment industry. PDRB has a positive and not significant effect on employment industry. Rate investment and Dummy variable have a negative and not significant effect on employment of the cigarette industry in the Kudus Regency.*

*Keywords: number of firms, PDRB, minimum wage city, interest rates, government policy*

### PENDAHULUAN

Kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah terletak pada sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia di sini berperan sebagai input dalam suatu proses produksi. Banyaknya permintaan akan tenaga kerja yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja akan menimbulkan masalah yang sangat serius yaitu pengangguran. Di Kabupaten Kudus, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah permintaan akan tenaga kerja oleh perusahaan, dimana dari tahun 1993-2011 banyaknya pencari kerja berjumlah dua kali lipat dari banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menandakan bahwa masih banyak pengangguran akibat ketidaksesuaian jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Industri rokok merupakan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Tercatat dalam kurun waktu 16 tahun yakni dari tahun 1994-2010 tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan rokok melebihi setengah dari total seluruh tenaga kerja yang ada di kabupaten ini. Hal ini menunjukkan bahwa industri rokok sangat potensial untuk dikembangkan mengingat perannya yang cukup signifikan bagi perekonomian Kabupaten Kudus, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tingkat jumlah unit usaha, PDRB sektoral, upah minimum, suku bunga dan faktor kebijakan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah unit usaha, PDRB sektoral, upah minimum, suku bunga dan faktor kebijakan pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri rokok di Kabupaten Kudus tahun 1993-2010.

### KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

Untuk dapat mengoptimalkan peran sektor industri rokok dalam penyerapan tenaga kerja, perlu diketahui tentang beberapa keadaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja

---

<sup>1</sup> Romadhansya Indra Setiyadi, Purbayu Budi Santosa

pada industri rokok di Kabupaten Kudus adalah jumlah unit usaha, PDRB sector industri, tingkat upah minimum, suku bunga dan faktor kebijakan pemerintah.

### **Pengaruh Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Jumlah unit usaha adalah jumlah perusahaan yang ada di dalam suatu industri (Rezal Wicaksono, 2010). Jumlah perusahaan sangat menentukan seberapa banyak tenaga kerja yang terserap. Semakin banyak jumlah perusahaan akan semakin meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dikarenakan semakin banyak jumlah faktor produksi berupa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu, jumlah unit usaha memiliki pengaruh positif terhadap angka penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

$H_1 = \text{Jumlah Unit Usaha berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja}$

### **Pengaruh PDRB Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Mankiw (2000) menjelaskan bahwa secara umum PDRB dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku. PDRB menurut harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik, sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

PDRB yang merupakan nilai barang dan jasa (output) suatu daerah memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hubungan antara jumlah output dengan penyerapan tenaga kerja adalah apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB sektor industri, dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang diteliti adalah tenaga kerja pada sektor industri, yakni industri rokok. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

$H_2 = \text{PDRB Sektor Industri berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja}$

### **Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Ehrenberg (1998:68) menyatakan apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta, berarti akan terjadi pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Haryo Kuncoro (2001), di mana kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja, tingkat upah memiliki hubungan yang negatif atau berbanding terbalik, dimana ketika tingkat upah naik perusahaan-perusahaan akan cenderung untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dikarenakan naiknya biaya produksi yang bisa menyebabkan perusahaan merugi. Sebaliknya, ketika upah turun, biaya produksi juga

cenderung turun sehingga perusahaan memperbanyak jumlah tenaga kerja untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

$H_3 =$  Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

### **Pengaruh Suku Bunga Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Investasi yang ditanamkan pada suatu negara atau daerah, ditentukan oleh beberapa faktor, yang antara lain: tingkat bunga, ekspektasi tingkat *return*, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat laba perusahaan, situasi politik, kemajuan teknologi dan kemudahan-kemudahan dari pemerintah (Kelana, 2000). Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal (investor). Para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (*return of investment*), yaitu berupa persentase keuntungan neto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar) yang diterima lebih besar dari tingkat bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito), dan menggunakannya untuk investasi.

Jika suku bunga investasi mengalami kenaikan, maka umumnya para pelaku bisnis akan menahan diri dalam melakukan investasi. Penurunan nilai investasi ini akan berdampak terhadap berkurangnya aktivitas usaha dari pelaku bisnis. Berkurangnya aktivitas usaha ini sekaligus juga akan berdampak terhadap berkurangnya penggunaan tenaga kerja. Besar kecilnya investasi yang dilakukan di sektor industri sebagai akibat perubahan suku bunga akan menyebabkan perubahan pada aktivitas produksi dalam suatu industri dan pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di industri tersebut. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

$H_4 =$  Suku Bunga Investasi berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

### **Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Kinerja suatu industri dipengaruhi oleh peranan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan pemerintah dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan yang bersifat mengintervensi maupun peraturan-peraturan yang sifatnya tidak langsung seperti kebijakan fiskal dan perpajakan, kebijakan ketenagakerjaan serta kebijakan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kinerja suatu industri pada akhirnya secara tidak langsung akan berdampak pada besar kecilnya penyerapan tenaga kerja.

Salah satu bentuk kebijakan dalam industri rokok berupa peraturan-peraturan pengendalian tembakau dan produk turunannya yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Adanya peraturan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada menurunnya angka penyerapan tenaga kerja akibat menurunnya volume produksi rokok. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

$H_5 =$  Kebijakan Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha, PDRB Sektor Industri, tingkat upah minimum, suku bunga investasi, dan kebijakan pemerintah.

- Penyerapan Tenaga Kerja, merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja atau dipekerjakan oleh perusahaan dalam memproduksi barang pada sektor industri pengolahan, dalam penelitian ini tenaga kerja yang bekerja atau dipekerjakan pada industri rokok di Kabupaten Kudus pada satu tahun tertentu. Tenaga kerja diukur dengan satuan jiwa.
- Jumlah Unit Usaha, merupakan jumlah perusahaan industri rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Jumlah unit usaha diukur dengan satuan unit.
- PDRB Sektor Industri, merupakan Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada tahun tertentu. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB sektor industri di Kabupaten Kudus, dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang diteliti adalah tenaga kerja pada sektor industri, yakni industri rokok. PDRB sektor industri diukur dengan satuan juta rupiah.

- Tingkat Upah Minimum, merupakan semua pengeluaran uang atau barang yang dibayarkan kepada buruh atau pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan terhadap perusahaan berdasarkan standart upah minimum yang ditetapkan kabupaten/kota, dalam hal ini UMK Kudus. UMK diukur dengan satuan rupiah.
- Suku Bunga Investasi, merupakan tingkat bunga investasi bank umum pada tahun tertentu. Suku bunga diukur dengan satuan persen per tahun.
- Kebijakan Pemerintah, mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan bahaya rokok bagi kesehatan.

### Penentuan Unit Penelitian

Unit penelitian dalam penelitian ini adalah industri pengolahan yakni industri rokok di Kabupaten Kudus yang datanya dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan data *time series* dari tahun 1993 sampai 2010.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode analisis regresi yakni analisis regresi berganda yang ditransformasikan ke logaritma berganda dengan menggunakan Logaritma Natural (Ln). Damodar Gujarati (1997) menyebutkan bahwa salah satu keuntungan dari penggunaan logaritma natural adalah memperkecil bagi variabel-variabel yang diukur karena penggunaan logaritma dapat memperkecil salah satu penyimpangan dalam asumsi OLS (*Ordinary Least Square*) yaitu heterokedastisitas. Adapun bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \text{Ln}\beta_0 + \beta_1\text{Ln}X_1 + \beta_2\text{Ln}X_2 + \beta_3\text{Ln}X_3 + \beta_4\text{Ln}X_4 + D + e_i$$

Dimana :

Y = jumlah tenaga kerja yang terserap dalam satu tahun

X1 = jumlah unit usaha

X2 = PDRB sektor industri

X3 = tingkat upah minimum kabupaten

X4 = suku bunga investasi

D = variabel *dummy*, pembeda periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Pengamanan Rokok

$\beta_0$  = intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = koefisien regresi parsial

$e_i$  = faktor pengganggu (*disturbance error*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Kudus

#### Keadaan Geografis

Kabupaten Kudus, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Kabupaten Kudus berada diantara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Secara administratif, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah, terdiri dari 20.666 Ha (48,61 persen) lahan pertanian sawah, 7.680 Ha (18,06 persen) lahan pertanian bukan sawah, sedangkan sisanya lahan bukan pertanian sebesar 14.170 Ha (33,33 persen).

#### Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2009 tercatat sebesar 759.249 jiwa, terdiri dari 376.058 jiwa laki-laki (49,53 persen) dan 383.191 jiwa perempuan (50,47 persen). Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2009 sebesar 98,14 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak

dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat hampir di semua kecamatan bahwa angka rasio jenis kelamin di bawah 100 persen, yaitu berkisar antara 93,35 dan 99,91 persen.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2005 – 2009) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2009 tercatat sebesar 1.786 jiwa setiap satu kilo meter persegi. Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 8.742 jiwa per km<sup>2</sup>. Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 954 jiwa per km<sup>2</sup>.

### Ketenagakerjaan

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Tahun 2011, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kudus mencapai 408.790 orang terdiri dari 383.399 orang yang bekerja dan 25.391 orang yang menganggur, sedangkan bukan angkatan kerja mencapai 176.594 orang terdiri dari anak sekolah, ibu rumah tangga dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kudus, dari tahun 1994-2010 jumlah orang yang bekerja di sektor industri mencapai rata-rata 39,44 persen per tahun dari total tenaga kerja dalam kurun waktu tersebut, dan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak kedua setelah sektor industri dengan rata-rata tenaga kerja 16,91 persen per tahun, diikuti sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi dengan rata-rata tenaga kerja yang bekerja pada sektor-sektor ini masing-masing 16,54, 10,54, dan 10,10 persen per tahun. Sementara orang yang bekerja di sektor-sektor lain seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan hanya rata-rata dibawah 10 persen per tahun.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus menyebutkan dari tahun 1993-2011 jumlah pencari kerja adalah 137.250 orang dengan rata-rata 7.224 orang pencari kerja per tahun, jauh lebih besar dibandingkan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan yang jumlahnya hanya setengahnya yakni 69.360 orang dengan rata-rata kebutuhan tenaga kerja 3.651 orang per tahun dalam kurun waktu yang sama. Hal ini mengakibatkan banyak pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16, setelah sebelumnya data diolah dengan menggunakan *Miccrosoft Office Excel 2007*. Berikut ringkasan hasil regresinya.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Hasil Regresi Persamaan LnY**  
**Industri Rokok di Kabupaten Kudus Tahun 1993-2010**  
Variabel dependen:LnY

Variabel	Coefficient		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	1,879	4,765	0,394	0,700
LnX1	0,608	0,182	3,339	0,006
LnX2	0,232	0,324	0,715	0,488
LnX3	0,270	0,041	6,575	0,000
LnX4	-0,161	0,163	-0,985	0,344
D	-0,021	0,075	-0,283	0,782

R Square	0,965
Standart Error	0,06865
F-Statistik	65,216

Sumber : Data diolah (2012)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel jumlah unit usaha dan upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel PDRB sektoral memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel suku bunga investasi dan variabel *dummy* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

### **Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Rokok di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil persamaan regresi tenaga kerja ( $\ln Y$ ) seperti yang terlihat pada Tabel 1, diketahui bahwa jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada taraf nyata 5 persen ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah unit usaha akan semakin meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Matz (2003) menyatakan bahwa peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Variabel jumlah unit usaha memiliki nilai koefisien sebesar 0,608 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen jumlah unit usaha akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,608 (dengan asumsi *ceteris paribus*). Nilai jumlah unit usaha memberikan pengaruh nyata secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok sebesar 95 persen ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus.

### **Analisis Pengaruh PDRB Sektoral terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Rokok di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil persamaan regresi tenaga kerja ( $\ln Y$ ) seperti yang terlihat pada Tabel 1, diketahui bahwa PDRB sektoral berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar PDRB sektoral akan semakin meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. PDRB menggambarkan nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan, dalam hal ini dihasilkan sektor industri. Apabila terjadi kenaikan permintaan output yang dihasilkan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan jumlah tenaganya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga secara tidak langsung, naiknya PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Variabel PDRB sektoral memiliki nilai koefisien sebesar 0,232 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,232 (dengan asumsi *ceteris paribus*).

Variabel PDRB memberikan pengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa peningkatan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus yang berarti bahwa peningkatan PDRB sektor industri yang ditunjukkan dengan kenaikan permintaan output yang dihasilkan perusahaan dalam suatu industri, tidak diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini mungkin dikarenakan dalam kurun waktu dari tahun 1993-2010 nilai PDRB sektoral cenderung sama setiap tahun dengan peningkatan yang tidak begitu besar dan terbilang konstan. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.4 di bawah ini, bahwa nilai PDRB cenderung konstan dengan peningkatan yang tidak terlalu besar, sehingga dengan nilai PDRB yang cenderung sama setiap tahunnya ini tidak memberikan pengaruh yang begitu besar dan nyata terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di industri rokok itu sendiri.

**Tabel 2**  
**PDRB Sektor Industri di Kabupaten Kudus**  
**Tahun 1993-2010**

Tahun	PDRB Sektor Industri (Juta Rupiah)	Peningkatan ( $\Delta$ )
1993	4329287	-
1994	4827954	0,12
1995	5259787	0,09
1996	5653140	0,07
1997	5580066	-0,01
1998	4920851	-0,12
1999	4942047	0,00
2000	4982115	0,01
2001	5112626	0,03
2002	5407457	0,06
2003	5715468	0,06
2004	6226357	0,09
2005	6557621	0,05
2006	6689910	0,02
2007	6901300	0,03
2008	7145779	0,04
2009	7421852	0,04
2010	7651969	0,03

Sumber : Data diolah (2012)

### **Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Rokok di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil persamaan regresi tenaga kerja ( $\ln Y$ ) seperti yang terlihat pada Tabel 1, diketahui bahwa upah memberikan pengaruh nyata secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok sebesar 95 persen ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus.

Namun dari segi kesesuaian tanda, upah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa hubungan yang negatif antara upah dan penyerapan tenaga kerja, yakni semakin besar upah akan semakin menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Ini berarti bahwa ketika upah naik, jumlah tenaga kerja industri rokok yang terserap juga naik. Upah yang dimaksud di sini adalah upah minimum kabupaten, yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam suatu industri, besarnya upah yang diberikan untuk membayar tenaga kerja untuk industri khususnya industri rokok tidak selalu sama dengan besarnya upah minimum kabupaten, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah, tergantung pada berbagai faktor diantaranya tingkat pendidikan dan kemampuan. Untuk kasus industri rokok, sebagian besar pekerjaannya adalah pekerja produksi yang rata-rata pekerjaannya memiliki pendidikan dan kemampuan yang cenderung rendah dengan upah di bawah UMK. Rendahnya upah yang diberikan membuat tenaga kerja yang terserap semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan peningkatan UMK tidak diikuti dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja industri rokok. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian tentang upah minimum yang dilakukan oleh Carl, Katz, dan Krueger (dalam Mankiw, 2000) menemukan suatu hasil bahwa peningkatan upah minimum ternyata malah meningkatkan jumlah pekerja.

Selain itu, adanya serikat pekerja yang bertujuan melindungi kesejahteraan pekerja/buruh juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Ketika terjadi kenaikan upah, perusahaan cenderung berkeinginan mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya

produksi. Namun, adanya serikat pekerja dengan berbagai kebijakannya akan memperkecil peluang perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya meskipun upah naik, dan mungkin malah akan mengusahakan bagaimana ketika upah naik, jumlah tenaga kerja yang terserap tidak berkurang atau bahkan meningkat. Oleh karena itu, adanya serikat pekerja juga memberikan penjelasan hubungan positif antara upah dan penyerapan tenaga kerja.

Variabel upah memiliki nilai koefisien sebesar 0,270 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen upah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,270 (dengan asumsi *ceteris paribus*).

### **Analisis Pengaruh Suku Bunga Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Rokok di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil persamaan regresi tenaga kerja ( $\ln Y$ ) seperti yang terlihat pada Tabel 1, diketahui bahwa suku bunga investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat suku bunga investasi akan semakin menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Naiknya tingkat suku bunga akan membuat investor menunda untuk melakukan investasi dikarenakan biaya untuk investasi yang tercermin dari bunga akan meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap berkurangnya aktivitas usaha dari pelaku bisnis. Berkurangnya aktivitas usaha ini sekaligus juga akan berdampak terhadap berkurangnya penggunaan tenaga kerja. Sehingga secara tidak langsung, naiknya suku bunga investasi akan menurunkan penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Variabel suku bunga investasi memiliki nilai koefisien sebesar -0,161 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen suku bunga akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,161 (dengan asumsi *ceteris paribus*).

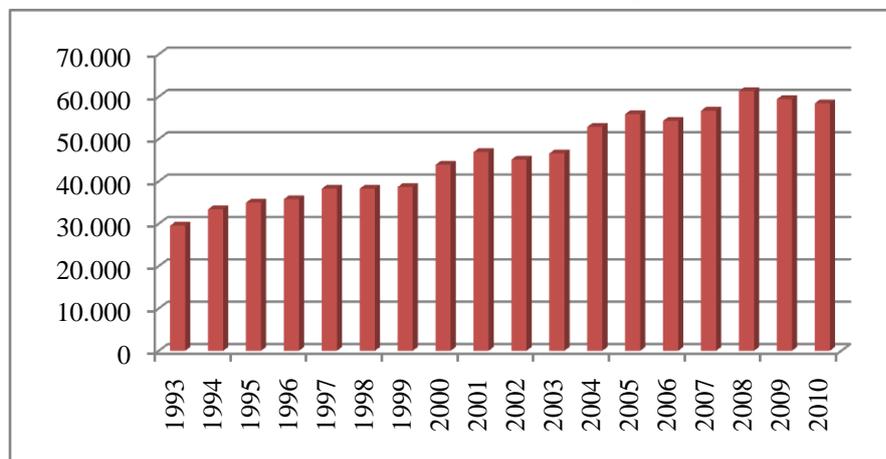
Dari segi signifikansi, variabel suku bunga investasi memiliki pengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok sebesar 95 persen ( $\alpha=5\%$ ), tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa peningkatan suku bunga investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini mungkin disebabkan karena keputusan untuk melakukan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya suku bunga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk kasus industri rokok, keputusan untuk investasi juga dipengaruhi oleh peluang mendapatkan keuntungan investasi yang disebabkan adanya kebiasaan/budaya merokok yang sudah menjamur di kalangan masyarakat sejak jaman dulu dan kebiasaan ini masih berjalan sampai sekarang, bahkan sangat sulit diubah. Selama kebiasaan merokok yang dilakukan masyarakat masih ada, permintaan akan rokok juga akan terus meningkat. Peluang memperoleh keuntungan investasi akibat permintaan rokok yang terus meningkat, secara tidak langsung berpengaruh pada jumlah tenaga kerja industri rokok yang terus bertambah untuk memenuhi permintaan akan rokok tersebut. Sehingga, dengan mengingat peluang tersebut, investasi akan terus dilakukan oleh para investor, dengan tidak begitu terpengaruh dengan berapa besarnya suku bunga. Dengan kata lain, besarnya suku bunga memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus.

### **Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Rokok di Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil persamaan regresi tenaga kerja ( $\ln Y$ ) seperti yang terlihat pada Tabel 1, diketahui bahwa faktor kebijakan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa adanya PP nomor 19 tahun 2003 tentang peringatan bahaya rokok bagi kesehatan akan semakin menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut secara teori memberikan dampak pada berkurangnya jumlah konsumsi rokok. Berkurangnya jumlah konsumsi rokok akan berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja sebagai faktor produksi dalam memproduksi rokok. Sehingga dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang peringatan bahaya rokok bagi kesehatan tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Variabel suku bunga memiliki nilai koefisien sebesar -0,021 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen suku bunga akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,021 (dengan asumsi *ceteris paribus*).

Dari segi signifikansi, variabel *dummy* memiliki pengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok sebesar 95 persen ( $\alpha=5\%$ ). Variabel *dummy* yang merupakan variabel pembeda antara periode sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan pengendalian rokok tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penterapan tenaga kerja dalam arti tidak ada perbedaan dari segi jumlah tenaga kerja yang terserap antara sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan tersebut. Adanya peraturan pengendalian rokok ini tidak begitu memberikan pengaruh, dikarenakan adanya kebiasaan/budaya merokok yang melekat di kalangan masyarakat yang masih ada sejak jaman dahulu sampai sekarang. Kebiasaan merokok ini menyebabkan permintaan akan rokok tetap atau bahkan meningkat, yang secara tidak langsung berpengaruh pada tenaga kerja yang terserap tidak berubah jumlahnya. Dengan kata lain, adanya peraturan pemerintah tentang peringatan rokok bagi kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di industri rokok Kabupaten Kudus. Hal ini juga dibuktikan dengan volume produksi rokok yang cenderung stabil sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan pengendalian rokok.

**Gambar 1**  
**Perkembangan Volume Produksi Rokok di Kabupaten Kudus**  
**Tahun 1993-2010 (Juta Batang)**



Sumber: Kudus Dalam Angka, diolah (1993-2010)

Tidak berubahnya volume produksi rokok sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan pengendalian rokok diikuti dengan tidak berubahnya angka penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa peraturan pengendalian rokok secara tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus, tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa faktor kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan dari penelitian terhadap industri rokok di Kabupaten Kudus pada tahun 1993 sampai 2010, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah unit usaha meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap secara signifikan.
2. Variabel PDRB sektoral berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa peningkatan PDRB sektoral akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap secara signifikan.

3. Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa upah memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yang terserap secara signifikan.
4. Variabel suku bunga investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa naiknya tingkat suku bunga investasi akan menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap secara signifikan.
5. Variabel kebijakan pemerintah yang dilambangkan dengan variabel *dummy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri rokok di Kabupaten Kudus. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa adanya kebijakan pemerintah tentang pengamanan rokok bagi kesehatan akan menurunkan jumlah tenaga kerja yang terserap secara signifikan.

### Keterbatasan

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa keterbatasan yakni sebagai berikut.

1. Keterbatasan dalam masalah data yang digunakan dalam penelitian sehingga hasil yang didapatkan yang nantinya akan digunakan sebagai saran maupun pengambilan kebijakan disesuaikan dengan situasi yang terjadi pada tahun yang diteliti.
2. Keterbatasan dalam memperoleh data yang spesifik seperti besarnya pengeluaran untuk modal dan tenaga kerja industri rokok, data investasi untuk industri rokok, dan beberapa data pendukung lainnya sehingga penelitian yang dilakukan tidak dapat dieksplorasi lebih jauh.

### Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah unit usaha, dalam hal ini adalah peningkatan jumlah perusahaan rokok di Kabupaten Kudus, atau juga dapat dilakukan dengan perluasan usaha pada unit usaha yang sudah ada.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Kudus terus melakukan pengawasan dan memantau implementasi upah minimum kabupaten/kota dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara berkesinambungan.

### REFERENSI

- Ananta, Aris. 1993. *Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Arsyad, Lincoln. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Badan Pusat Statistik. 1993. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- 1994. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- 1995. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- 1996. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- 1997. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- 1998. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.

- \_\_\_\_\_ 1999. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2000. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2001. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2002. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2005. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2007. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Kudus Dalam Angka*. Jawa Tengah.
- Depnakertrans. 2004. *Penanggulangan Pengangguran di Indonesia*. Majalah Nakertrans Edisi-03 TH. XXIV- Juni.
- Dumairy. 1998. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N, Grogory. 2000. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- Simanjuntak, Payaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Soeharsono Sagir. 2001. *Kesempatan Kerja Ketahanan Nasional Dan Pembangunan Manusia Seutuhnya*. Bandung: Alumni.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny, 2003. Upah Minimum bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. *Jurnal Analisis Sosial* vol.7, no.1, hal. 77.
- Tim Peneliti SMERU. 2001. "Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia". SMERU: Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian.



Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.

Wicaksono, Rezal. 2010. "Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia tahun 1990-2008". Skripsi SI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.